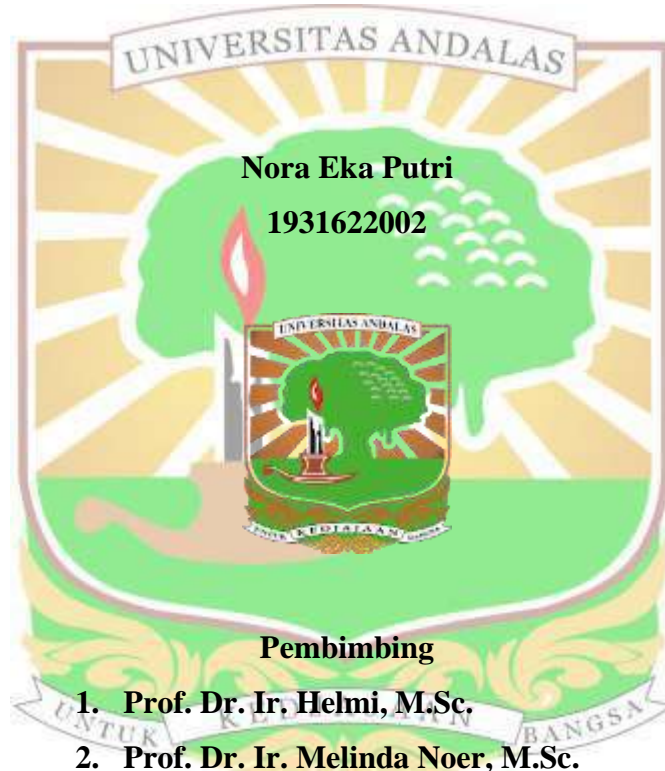


**POLITIK KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH:  
PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN *HYBRID POLICY MODEL*  
PADA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL  
DI SUMATRA BARAT**

**DISERTASI**



**Nora Eka Putri**

**1931622002**

**Pembimbing**

- 1. Prof. Dr. Ir. Helmi, M.Sc.**
- 2. Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc.**
- 3. Yossyafra, ST, M.Eng.Sc., Ph.D.**

**PROGRAM DOKTOR STUDI PEMBANGUNAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2023**

**POLITIK KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH:  
PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN *HYBRID POLICY MODEL* PADA  
PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL  
DI SUMATRA BARAT**

Oleh: Nora Eka Putri (1931622002)

(Dibawah bimbingan: Prof. Dr. Ir. Helmi, M.Sc., Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc., dan  
Yossyafra, ST, M.Eng, Sc. Ph.D)

**Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi fenomena social pengadaan tanah pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia, dengan focus pada proyek Jalan Tol Seksi Sicincin–Padang di Sumatra Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan dan kendala pengadaan tanah pembangunan jalan tol di Indonesia dan di Sumatra Barat (secara khusus); mendeskripsikan analisis risiko sosial dan potensi manfaat sosial pengadaan tanah pembangunan jalan tol di Sumatra Barat; mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh budaya masyarakat, *political will* (kemauan politik), *land governance* (tata kelola lahan) terhadap kualitas pengambilan keputusan melalui partisipasi masyarakat pada pengadaan tanah pembangunan jalan tol di Sumatra Barat. Terakhir, merumuskan *hybrid policy model* pada proses pengambilan keputusan pengadaan tanah pembangunan jalan tol di Sumatra Barat sebagai usulan untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Pendekatan penelitian ini adalah pragmatism, yaitu paradigma yang mencakup gagasan, metode, pendekatan, principal, atau campuran dari semuanya untuk menjelaskan solusi bagi masalah *mixed methods* penelitian. Varian *mix method* yang digunakan adalah *concurrent triangulation* yaitu penelitian dua sisi yang dilakukan secara bersamaan, sehingga kedua sisi memiliki penekanan yang sama (teknik pengumpulan dan analisis data). Data dikumpulkan dari informan yang relevan dan responden dari masyarakat terdampak (325 orang responden). Analisis data dilakukan secara kualitatif (SSM-analisis CATWOE) dan kuantitatif (*structural equation model*-SEM) yang kemudian keduanya saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol di Indonesia maupun jalan tol seksi Sicincin–Padang belum optimal, karena masih terdapat masalah seperti penolakan nilai ganti kerugian; masalah trase jalan, administrasi pengadaan tanah; koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Hasil indeks risiko sosial pengadaan tanah jalan tol seksi Sicincin–Padang terkategori sedang hingga rendah, terutama faktor pemindahan asset dan implementasi regulasi. Potensi manfaat social dapat diupayakan melalui jalur diskusi dan dialog antara pemerintah, investor dan masyarakat terdampak. Kemudian, berdasarkan uji hipotesis, diketahui bahwa variabel budaya masyarakat, *political will* dan *land governance* terhadap kualitas pengambilan keputusan melalui partisipasi masyarakat memiliki nilai pengaruh yang berbeda-beda. Berdasarkan temuan di atas dirumuskan *hybrid policy model* kebijakan pengadaan tanah (terutama pada tahap perencanaan) sebagai kebaruan konsep yang dapat menjadi alternatif solusi terhadap masalah pengadaan tanah jalan tol. Kata Kunci: politik kebijakan; *hybrid policy model*, pengadaan tanah

# **POLICY OF LAND ACQUISITION: HYBRID POLICY MODEL DECISION-MAKING PROCESS IN THE ACQUISITION OF LAND FOR TOLL ROAD DEVELOPMENT IN WEST SUMATRA**

By: Nora Eka Putri (1931622002)

(Supervised by: Prof. Dr. Ir. Helmi, M.Sc., Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc., and Yossyafra, ST, M.Eng, Sc. Ph.D)

## ***Abstract***

*This research explores the social phenomenon of land acquisition in Indonesia, with a focus on the Sicincin-Padang Seksi Tol project in Western Sumatra. The aim of this study is to analyze the implementation and barriers of land acquisition and road development in Indonesia and in Western Sumatra (in particular); describe the analysis of social risks and potential social benefits of land purchase and road construction in West Sumatra; know and describe influence of culture, political will, land governance on the quality of decision-making through the participation of the community in land acquisitions and road building in Western Sumatra. Finally, formulate a hybrid policy model on the decision-making process for land acquisition and road construction in Western Sumatra as a proposal to address emerging problems. This research approach is pragmatism, i.e. a paradigm that includes ideas, methods, approaches, principles, or a mixture of all to explain solutions to the problem of mixed methods of research. Varian mix method used is concurrent triangulation which is the study of two sides carried out simultaneously, so that both sides have the same emphasis. (Data collection and analysis techniques). Data collected from relevant informants and respondents from affected communities (325 respondents). Data analysis is carried out qualitatively (SSM-analysis CATWOE) and quantitatively (structural equation model-SEM) which then both reinforce each other. The findings indicate that the implementation of land acquisition of toll roads in Indonesia and the Sicincin-Padang sex road is not optimal, because there are still problems such as rejection of the value of damages; problems of road tracks, land administration; coordination between the central government, local government and the community. The result of the social risk index of land acquisition on the Sicincin-Padang highway is classified as medium to low, especially the factors of asset transfer and regulatory implementation. The potential social benefits can be pursued through the path of discussion and dialogue between governments, investors and affected communities. Later, based on the test of the hypothesis, it is known that the cultural variables of society, political will and land governance on the quality of decision-making through public participation have different values of influence. Based on the findings above, the hybrid policy model of land acquisition policy (especially at the planning stage) is formulated as a new concept that can be an alternative solution to the problem of land procurement.*

*Keywords: policy politics; hybrid policy model; land acquisition.*